

BAB I

Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis menetapkan, " Peran FIS (Front Islamique du Salut) Dalam Transisi Demokrasi di Aljazair." Menjadi judul penelitian ini. Alasan pertama adalah karena FIS merupakan gerakan Islam yang lahir ditengah- tengah peta perpolitikan yang lebih didominasi oleh elit sekuler yang lebih berhaluan sosialis yang di pandang sangat bertolak belakang dengan Islam. Sedangkan FIS adalah kekuatan Islam di Aljazair terbesar setelah diadakannya reformasi politik oleh pemerintahan Benjedid.

Alasan kedua karena setelah lepas dari penjajahan Perancis, gerakan-gerakan Islam di Aljazair ingin merebut kembali simpati masyarakat dengan kembali ke khittah perjuangan semula yaitu mendirikan negara yang merdeka dan demokrasi non- sekuler. Sehingga yang semula pemerintahannya sangat oteriter hanya satu partai politik, Front Pembebasan Nasional (FLN). Mengalami krisis ekonomi yang serius pada pertengahan 1980-an akibat dampak krisis ekonomi dunia yang diperburuk oleh jatuhnya harga minyak di pasar internasional. Padahal 90 persen lebih ekspor Aljazair berupa minyak dan produk terkait lainnya. Kegagalan ekonomi yang dijalankan pemerintah, utang nasional yang membesar, angka inflasi dan pengangguran yang tinggi, memberi dampak yang buruk bagi industrialisasi, pertanian, serta pelayanan publik dan sosial. Sehingga pemerintah

... .. reformasi politik mereka menerapkan sistem yang

lebih demokratis dengan melakukan pemilu yang pertama yang diikuti oleh beberapa partai, merupakan hal yang menarik untuk ditelaah oleh penulis.

Pemerintahan Presiden Benjedid kemudian menjanjikan kebebasan politik yang lebih besar dan demokrasi untuk menanggapi ketidakpuasan rakyat. Reformasi politik yang dilakukan Benjedid mencakup revisi konstitusi dan pada tahun 1989, revisi yang menghapus tradisi sosialis Aljazair. Langkah ini mengakhiri monopoli FLN atas negara dan mengubah Aljazair menjadi negara satu partai menjadi sistem politik multipartai yang kompetitif.

Kemandekan ekonomi Aljazair pada akhir 1980-an, merupakan peluang besar bagi gerakan pembaharuan Islam tersebut untuk memaksa Benjedid mengubah sistem satu partai menjadi sistem multipartai. Oleh karena keruntuhan sistem satu partai yang dianut Aljazair sejak merdeka tahun 1962 melalui front pembebasan Islam (FLN) membuka peluang besar pula bagi gerakan pembaharuan Islam untuk mendirikan partai politik Islam pertama di Aljazair FIS (Front Islamique du Salut).¹

Oleh karenanya dalam skripsi ini penulis mengambil judul “ **PERAN FIS (FRONT ISLAMIQUE DU SALUT) DALAM TRANSISI DEMOKRASI DI ALJAZAIR**”.

B. Tujuan Penulisan

1. Penulis ingin mengetahui sejauh mana peran FIS (Front Islamique du Salut) di Aljazair dalam fase transisi demokrasi yang terjadi di Aljazair.

1. 2001, FIS di

2. penulis ingin mengetahui perubahan politik diAljazair dari tahun 1988-1992.
3. Untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan (S I) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Tampilnya kembali Islam dalam rumusan politik umat dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak menarik perhatian media, pers, konferensi-konferensi dan publikasi-publikasi yang tidak terbilang banyaknya. Baik dalam keyakinan maupun didalam sejarahnya Islam telah menduduki tempat penting dalam ideologi negara dan dalam tingkah laku politik umat sejak masa berdirinya diabad ke 17 sampai ke abad 20 sekarang .

Usai perang dingin mengakibatkan terjadinya perubahan pola politik Internasional dari bipolar menjadi multipolar diantara kekuatan – kekuatan utama industri barat. Namun dinegara-negara pinggiran (peripheri)telah menyebabkan terdorongnya Islam sebagai oposisi terdepan dari Hegemoni barat.²

Aljazair, negara yang terletak di Afrika Utara ini, merupakan salah satu negeri Islam yang penuh konflik, Aljazair merdeka pada tahun 1962 setelah selama 132 tahun dijajah oleh perancis, dan diakhiri dengan revolusi berdarah selama delapan tahun

Dilihat dari struktur sosial- budaya dan sejarah Aljazair, masyarakat Aljazair tidaklah homogen, sekitar 20 persen penduduk Aljazair yang berjumlah

32 juta orang itu, adalah etnis Barber. Sementara itu, kurang lebih satu juta orang adalah warga keturunan Perancis. Kedua etnis ini gigih mempertahankan bahasa dan budaya mereka sendiri.

Masyarakat Aljazair terdapat dua golongan besar, pertama golongan sekuler. Orientasi budayanya merujuk pada kebudayaan barat, khususnya Perancis. Hal ini dikarenakan Aljazair merupakan bekas jajahan nagara Perancis yang lebih dipersiapkan untuk mengambil alih kebudayaannya dibandingkan negara Arab lainnya. Kedua, golongan bawah yang masih kuat berpegang pada kebudayaan Arab Islam tradisional. Bermukim di pedesaan dan wilayah kumuh perkotaan yang kebanyakan mereka memakai bahasa Arab.

Meskipun diberi nama Republik Demokrasi Rakyat Aljazair, sesungguhnya Aljazair adalah sebuah negara Otoniter. Karena negara ini berturut-turut diperintah oleh pemerintahan otokrasi FLN (National Liberation Front) yang menganut ideology Marxisme sejak memperoleh kemerdekaan dari Perancis, FLN ditetapkan sebagai partai tunggal Aljazair oleh Presiden pertama Ahmad Ben Bella yang kemudian digulingkan oleh Houari Boumediene dalam suatu kudeta militer pada tahun 1965. Boumedine digantikan oleh Chandli Benjedid (yang memerintah sejak tahun 1978).

Dibawah dominannya kekuasaan FLN sejak tahun 1962 setelah lepas dari jajahan Perancis, perekonomian cukup berantakan terutama pada pemerintahan Benjedid yang memang terkenal sangat korup dan itu menambah kekecewaan rakyat terhadap pemerintah, salah satu bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan

besar besaran yang diakibatkan adanya kerusuhan pangan karena kelangkaan pangan, korupsi yang merajalela dan semakin parah, pemerintah yang tidak efisien yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran sehingga terjadilah gelombang demonstrasi rakyat berlangsung diseluruh negeri.

Padahal apa yang dituntut mereka adalah suatu perubahan dan kehidupan yang lebih baik dari pada zaman penjajahan asing. Tetapi didalam kenyataannya, maka sesudah bentuk penjajahan cara lama yang dilawannya, kaum muslimin yang merasa juga mempunyai saham didalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan bernegara itu, hanya menemui penjajahan model baru yang dilakukan oleh sesama bangsanya sendiri. Idaman untuk lepas dari penjajahan asing agar bisa menikmati suatu kehidupan dinegara yang merdeka dan demokratis, bebas dari rasa takut dan khawatir mengenai keselamatan dan keamanan mereka ternyata belum bisa terwujud dibawah pemerintahan bangsa sendiri.³

Ketidakpuasan ini membuka jalan bagi kelompok kelompok perantara sebagai pengkritik pada kebijakan-kebijakan yang berorientasi barat. Banyak kalangan berpendapat bahwa suatu pemecahan boleh jadi ditemukan dengan kembali ke pribadian Islam. Memang pemerintah selama ini telah menerapkan kebijakan Islam, namun dalam pengertian yang telah dimanipulasi. Akibatnya interpretasi Islam untuk kemajuan telah mengalami kemacetan karena telah dibelenggu oleh kebijakan kebijakan interpretasi penguasa. Jadi cukup dimengerti bila rakyat cenderung pro kepada gerakan Islam.

³ Ismail Al Bandjar, "*Arah Gerakan Fundamentalisme Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara*", *Jurnal Ilmu Politik 12 (AIP)* PT. Gramedia Pustaka Utama Hal 41

Ketika Benjedid sedang memikirkan pembaharuan ekonomi dan politik, kelompok Islam sibuk pula membangun basis kekuatan yang akan mengikuti mereka nanti dalam perubahan konstitusional pada 1989. Proses gerakan Islam dibangun berdasarkan jaringan kerja diantara " masjid masjid bebas " yang telah lepas dari pengawasan pemerintah pusat. Sejak kemerdekaan, negara melalui menteri agama telah berusaha mengatur praktek keagamaan di masjid –masjid dengan mengangkat imam-imam yang berwenang memberi khotbah dan memimpin umat disekitar mesjid yang dipimpinnya. Tentu saja kehidupan imam melalui SK ini dijamin oleh pemerintah melalui gaji yang tetap, dengan kewajiban utama melaporkan segala kegiatan keagamaan yang mengarah kepada sikap anti-anti pemerintah. Pada mulanya kebijakan pemerintah itu dijalankan dengan baik, sebagaimana yang terlihat pada kekuasaan Boumedine. Namun mulai 1980 an yang ditandai menurunnya harga minyak (yang merupakan penunjang ekonomi Aljazair), pemerintah tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melampaui 3% setahun. Kondisi tersebut semakin membatasi kesempatan kerja bagi tenaga kerja baru yang berusia muda. Padahal komposisi penduduk Aljazair 60% adalah orang-orang muda yang berusia dibawah 25 tahun, usia yang sangat emosional untuk menuntut terjadinya perbaikan ekonomi dan pembaruan sistem politik. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok Islam pada oktober 1988 untuk melakukan demonstrasi besar besaran yang memaksa pemerintah

... ..

Peristiwa itu akhirnya mendesak presiden Benjedid untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih demokratis yakni dengan pemilu multi partai. Beberapa reformasi politik yang dilakukan oleh Benjedid antara lain, adanya konstitusi baru yang dibentuk dengan referendum bulan february 1989 yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul, dan hak untuk membentuk partai politik, dengan mengakhiri partai tunggal FLN. Hal ini mendorong munculnya sekitar 50 partai-partai baru untuk mengikuti pemilu tingkat lokal. Ada sekitar 11 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Sedikitnya ada tiga partai utama Islam di Aljazair. Yakni Front penyelamat Islam (FIS) dengan istilah Arab al-Jabha al Islamiyya li-Inqadh, Gerakan Masyarakat Islam (Hamas), dan Gerakan Kebangkitan Islam (MNI= Mouvement de la Nahda Islamique). Ketiga partai ini biasa ditambahkan pada Liga Panggilan Islam (LIC = Rabitat ad-Da'wa al-Islamiyyah) dan sejumlah partai kecil lain yang menyuarakan Islam. Partai partai kecil ini kurang diketahui dan peranannya kurang menentukan.

Reformasi konstitusi tidak hanya mencakup pemilu multi partai yang lebih demokratis, tapi juga liberalisasi sektor ekonomi, kebebasan mendirikan partai politik dan organisasi, kemerdekaan berekspresi, serta pembatasan kontrol pemerintah terhadap sumber informasi. Artinya sejak saat itu berakhirilah sistem partai tunggal dan monopoli kekuasaan FLN dalam percaturan politik Aljazair pasca -kemerdekaan.

Reformasi ini dianggap peluang oleh beberapa gerakan Islam, antara lain FIS (Front Islamique du Salut). FIS merupakan Partai Islam terbesar dan paling berpengaruh yang lahir pada tahun 1989. Gerakan Islam tumbuh dengan pesat setelah liberalisasi konstitusi pada februari 1989, setelah kerusuhan karena pangan pada oktober lalu sebelumnya. Gerakan yang sampai sekarang ini cair dan samara-samar mulai terbentuk menjadi berbagai organisasi yang berbeda-beda, termasuk partai-partai politik dan juga kelompok Islam yang bertujuan keagamaan sosial budaya, dan juga tujuan politik. Menurut Hugs Roberts dalam buku *Islamic Fundamentalism and The Gulf Crisis* (1991), FIS adalah partai Islam terbesar dan paling berpengaruh saat ini diAljazair. FIS dengan cepat berkembang menjadi kekuatan utama yang mampu memobilisasi sejumlah besar pendukung, serta memiliki organisasi berskala nasional yang mengesankan.

FIS telah mendukung kebijaksanaan pemerintah untuk meliberalisasi ekonomi. Tetapi seperti juga Hamas, MNI dan LIC, komitmennya yang utama adalah merombak Aljazair dengan konstitusi baru berdasarkan hukum Islam (*shari'a*) dan badan konsultasi serta musyawarah yang Islamis (*shura*). Ini untuk menggantikan konsep Barat bagi pluralisme dan demokrasi perwakilan.

FIS berbeda dengan gerakan- gerakan lain dalam tiga aspek utama ini.

Pertama, ia menekankan pengambilan kekuasaan politik, sebagai langkah awal reformasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Maka partai-partai ini bisa dianggap lebih "Revolusioner" ketimbang saingan-saingannya. FIS sejauh ini

1.

mempertahankan hak untuk menyatakan penolakan prinsipil atas konstitusi itu, yang dianggapnya tidak Islamis.

Kedua, FIS sejauh ini adalah yang paling populis dari semua gerakan Islam di Aljazair, baik dalam strategi maupun dalam gaya politiknya. Menurut pengamatan Roberts, pandangan FIS relative “tipis” secara intelektual dan isi doktrin. Sedangkan populisme dan eklektisisme doctrinal FIS, yang ditambah dengan kekuatan mobilisasi yang lebih besar ketimbang kelompok-kelompok lain, telah mendorongnya untuk mengakomodasi derajat sosial dan heterogenitas politik yang jauh lebih besar dalam rangkingnya. Ketiga FIS juga terdorong mengartikulasikan keanekaragamannya lewat kepemimpinan yang kuat namun rumit.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah : **Bagaimana Peran FIS (Front Islamique du Salut) Dalam Transisi Demokrasi di Aljazair ?**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

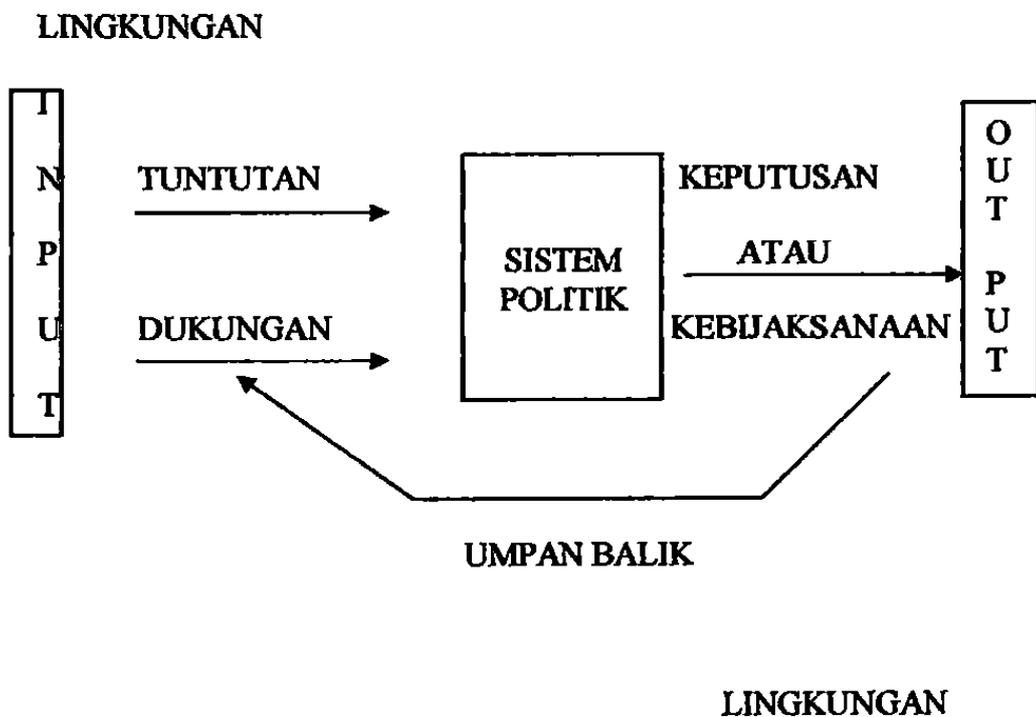
Teori bentuk penjelasan penting umum yang memberitahukan kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi, jadi selain dipakai untuk eksplanasi teori juga menjadi dasar bagi prediksi .⁵

Penggunaan kerangka dasar teori dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta membantu didalam memilih konsep yang tepat dalam pembentukan hipotesa. Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, guna

memudahkan pengembangan analisa disini penulis mencoba menggunakan konsep pendapat- pendapat para ahli yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

David Easton menyatakan bahwa Sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi didalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.⁶

David Easton seorang ilmuwan politik telah membangun sebuah metode untuk menganalisa berbagai jenis sistem politik. Dengan rumusan sederhana untuk menjelaskan berbagai hal: input—sistem atau proses politik—output. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber: Mohtar Mas' oed & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University prees, 1997, hal 5

David Eston menjelaskan lebih lanjut dari model diatas :

1. Ciri-ciri identifikasi. Untuk membedakan suatu sistem politik dari sistem-sistem sosial lainnya, kita harus mengidentifikasinya dengan menggambarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit yang ada diluar sistem politik itu.⁷

a) Unit-unit sistem politik. Unit-unit yang membentuk suatu sistem.

Dalam sistem politik, unit-unit itu berwujud tindakan-tindakan politik.

b) Perbatasan dari beberapa pertanyaan paling penting berkenaan dengan berfungsinya sistem politik hanya dapat dijawab bila kita memahami fakta bahwa suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan berupa sistem-sistem lain.

2. Input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan didalam sistem tersebut. untuk menjamin bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara ajeg. Tanpa input sistem itu tidak akan dapat berfungsi.

3. Diferensiasi dalam suatu sistem lingkungan itu memberikan energi untuk mengaktifkan suatu sistem serta informasi tentang arah

.....

dan sistem itu menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungannya .⁸

4. Integrasi dalam suatu sistem fakta tentang diferensiasi membukakan suatu wilayah yang luas bagi penelitian sistem-sistem politik diferensiasi structural ini mengatur kekuatan-kekuatan yang selalu berubah yang secara potensial bisa merusak integrasi.

Untuk lebih lanjutnya penulis akan mengaplikasikan model diatas untuk mengupas terjadi perubahan politik di Aljazair.

Dibawah kekuasaan FLN sejak tahun 1962, perekonomian Aljazair cukup berantakan. Sejak lepas dari penjajahan perancis Aljazair adalah Negara otoritarian hanya satu partai politik FLN. Negara mengalami krisis ekonomi yang serius pada pertengahan 1980-an akibat dampak krisis ekonomi dunia yang diperburuk oleh jatuhnya harga minyak dipasar internasional, padahal 90 persen lebih ekspor Aljazair berupa minyak dan produk lainnya. Kegagalan ekonomi yang dijalankan pemerintah, utang nasional yang membesar, angka inflasi dan pengangguran yang tinggi, memberi dampak yang buruk bagi industrialisasi, pertanian serta pelayanan publik dan sosial. Hal ini diperparah oleh pemerintahan Benjedid yang terkenal dengan korupsi sehingga menambah kekecewaan rakyat terhadap pemerintah. Sehingga berbagai demonstrasi dilakukan oleh rakyat yang merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Puncaknya pada tahun 1988, Aljazair dimuncani oleh protes besar-besaran dan menimbulkan gelombang

demonstrasi berlangsung diseluruh negeri. Gelombang demonstrasi ini ditunggangi oleh kekuatan politik Islam yang menginginkan perubahan

Makin membesarnya tuntutan rakyat kepada pemerintahan Benjedid yang menginginkan jaminan atas hak-hak asasi manusia serta memberikan kebebasan dalam berpendapat tanpa membedakan suku, ras agama dan golongan. Hal ini mengacu pada keinginan rakyat untuk mengakhiri penggunaan sistem partai tunggal, yang dirasa tidak demokratis, beralih pada pemilu multi partai yang benar-benar pilihan rakyat.

Tuntutan rakyat mendapat dukungan dari unsur Islam yang selama ini cita cita dan perjuangan golongan Islam dikesampingkan oleh elit sekuler yang beraliran sosialis, yang menginginkan sebuah negara yang merdeka yang demokratis tetapi non sekuler.

Akhirnya pemerintah Aljazair yang pada waktu itu adalah presiden Benjedid untuk melakukan reformasi politik, dengan melakukan pemilu yang pertama dengan sistem multi partai yang lebih demokratis.

Munculnya beberapa beberapa partai politik yang mewakili aspirasi rakyat diantaranya FIS yang disebut merupakan partai yang mendapat dukungan cukup besar dari kalangan bawah yang mayoritas muslim. Dan diharapkan dapat mengakomodasi seluruh keinginan rakyat .

Terdapat dua jenis input di dalam sistem politik, yaitu input yang berupa tuntutan dan input yang berupa dukungan. Kedua jenis input inilah yang akan memberikan bahan mentah yang harus diproses didalam sistem politik, dan juga

sistem politik, Tanpa adanya kedua jenis input ini, maka sistem politik tidak akan dapat menjalankan fungsinya. Kedua jenis input ini, tuntutan dan dukungan, berasal dari lingkungan sistem politik, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.⁹

Dalam suatu sistem politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan sebenarnya merupakan input yang disampaikan kepada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berwenang membuat keputusan atau kebijaksanaan yang mengikat, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat dan pemerintah.

Artikulasi kepentingan adalah proses untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut *Interest Group* atau kelompok kepentingan¹⁰. Tapi ada kemungkinan pula fungsi ini bisa dijalankan oleh partai politik.

Interest groups atau kelompok kepentingan pada awalnya menerima atau menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan oleh masyarakat, dan kemudian kelompok-kepentingan membuat rumusan-rumusan tentang kepentingan-kepentingan itu. Setelah kepentingan-kepentingan itu dirumuskan, kemudian baru dibawa kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijaksanaan. *Kemungkinan-kemungkinan yang telah disampaikan kepada badan-badan politik*

maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat putusan atau kebijaksanaan itu, diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana mengubah atau mengkonfersikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif kebijaksanaan umum.¹¹ Agregasi kepentingan juga merupakan salah satu fungsi input, Setiap sistem politik mempunyai berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang telah diartikulasikan oleh kelompok-kelompok kepentingan lembaga-lembaga maupun organisasi lainnya.

Jadi melalui tahapan-tahapan yang tertentu didalam sistem politik, kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat ditampung untuk dijadikan alternative-alternative kebijaksanaan. fungsi menampung kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan tersebut dinamakan *agregasi kepentingan*

Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan biasanya menjalankan pula fungsi-fungsi artikulasi kepentingan. Adapun struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan mungkin sekali berbeda-beda disetiap negara. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah lembaga dan partai politik.¹²

Menurut pandangan O'Donnell dan Schmitter, demokratisasi mengacu pada proses-proses dimana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik yang dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya kontrol dengan kekerasan, tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktek administratif), atau diperluas sehingga mencakup mereka yang sebelumnya tidak ikut menikmati hak dan kewajiban misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritas dan lembaga-lembaga yang semula tidak menjadi wilayah partisipasi masyarakat (misalnya badan-badan pemerintah, jajaran militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasi kepentingan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya).¹³

Terdapat sebuah proses transisi dalam demokratisasi. Transisi menuju demokratisasi adalah sebuah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dengan rezim lainnya¹⁴. Transisi dibatasi disatu sisi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian, dan disisi lain oleh pengesahan berupa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan alternatif revolusioner¹⁵. Sebuah tanda tipikal yang menandai dimulainya suatu masa transisi adalah ketika suatu penguasa otoriter, demi alasan apa pun mulai memodifikasi peraturan-peraturan untuk mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak individu atau kelompok¹⁶.

¹³ Guillermo O'Donnell & Philippe C Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian*

F. Hipotesa

Untuk menjawab fenomena tersebut di atas dengan berdasarkan pada landasan pemikiran penulis mencoba mengajukan hipotesa sebagai jawaban sementara bahwa peran FIS dalam transisi demokrasi di Aljazair melalui :

1. FIS sebagai embrio Civil Society
2. Keterlibatan FIS dalam pemilu untuk membentuk pemerintahan sipil.

G. Metode Penulisan

Agar penulisan ini menjadi terarah dan sesuai dengan kriteria keilmuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan keobjektifannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder¹⁷ baik berupa buku, makalah, jurnal atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik yang penulis angkat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Research, yaitu metode atau pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan berusaha untuk menganalisisnya dengan didukung dengan data-data yang ada.

H. Jangkauan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan supaya penulisan dapat lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan, maka

¹⁷ - - - - -

penelitian ini secara khusus membahas mengenai FIS (Front Islamique du Salut)serta perannya dalam transisi demokrasi yang terjadi di Aljazair diantara tahun 1988- 1992

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi kedalam V bab, masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, dan jangkauan penelitian.

Bab II Dinamika Politik Di Aljazair

Bagian ini memaparkan tentang, tinjauan politik historis, gambaran umum nagara Aljazair tinjauan ekonomi Aljazair. Militer. Serta menceritakan FIS(Front Islamique du Salut) sebagai parpol dialjazair.

Bab III Transisi Demokrasi Di Aljazair

Secara keseluruhan bab ini menceritakan terjadinya perubahan yang mengarah ke Demokratisasi di Aljazair

Bab IV Peran FIS (Front Islamique du Salut) Dalam Transisi Demokrasi Di Aljazair

Bab ini memaparkan secara keseluruhan peran FIS dalam perpolitikan diAljazair pada tahun 1988-1992.

Bab V Kesimpulan